

**“ARAB SPRING”
DAN MASA DEPAN TIMUR TENGAH**
Tinjauan Seorang Wartawan

Oleh:

Trias Kuncahyono

disampaikan dalam seminar
“Peranan Indonesia dalam Upaya Perdamaian di Timur Tengah”

yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)
bekerjasama dengan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 14 April 2016



“Arab Spring” dan Masa Depan Timur Tengah*

- Tinjauan Seorang Wartawan
Trias Kuncahyono*

A. Pendahuluan

Mohammed Bouazizi, nama lengkapnya Tarek al-Tayeb Mohamed Bouazizi (26), pedagang kaki lima yang menjual buah dan sayuran, membakar diri di Sidi Bouzid, Tunisia. Hari itu, 17 Desember 2010. Dengan membakar diri, Bouazizi tidak bermaksud untuk memulai sebuah revolusi Tunisia. Ia, bahkan, tidak tahu, tidak memperkirakan bahwa tindakannya memotivasi rakyat di sejumlah negeri Dunia Arab bergerak memperjuangkan perubahan sosial, perubahan politik; reformasi demokratik, melawan rezim yang berkuasa, dan pada ujungnya menyingkirkan penguasa yang dianggap otoritarian, yang dianggap diktator, yang dianggap hanya memikirkan diri dan keluarga serta kelompoknya saja.

Meskipun tindakan bakar diri Bouazizi lebih merupakan ungkapan kefrustasiannya menghadapi beratnya hidup ketimbang sebuah keputusan yang dimaksudkan untuk mendorong terjadi perubahan sosial dan politik, tetapi apa yang ia lakukan menjadi simbol gerakan lokal dan kerusuhan yang pada akhirnya melanda seluruh Tunisia dan bahkan melintas perbatasan dan mengobarkan pergolakan di sejumlah negara di Dunia Arab. Bouazizi tidak menginspirasi pergolakan di Arab karena ia istimewa; ia menginspirasi demonstrasi karena situasinya sama sekali tidak unik. Tidak unik, karena situasi di negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika utara, hampir sama dengan situasi di Tunisia. Bouazizi menjadi simbol ekspresi frustrasi sosial-kultural yang begitu kuat: ketidakmampuan anak muda mewujudkan cita-cita menjadi matang, dewasa, mandiri, memiliki pekerjaan.¹ Bouazizi secara cepat menjadi simbol keputusan ekonomi yang sama-sama dirasakan mayoritas rakyat Tunisia.²

Sebelum revolusi pecah, apa yang disebut Mukjizat Ekonomi Tunisia tampak bagus bagi para pengamat dari luar, tetapi ketidaksamaan/ketimpangan dan ketidakpuasan meningkat begitu cepat selama beberapa tahun. Dalam dekade sebelum revolusi, pertumbuhan GDP rata-rata lima persen, terutama sumbangan dari sektor jasa dan ekonomi industri. Tetapi, di balik angka pertumbuhan itu, tingkat pengangguran dari tahun 1981-2014, tidak pernah di bawah 14 persen (jumlah penduduk pada tahun 2011, adalah 10.777.500 jiwa).³ Angka pengangguran meningkat dari 13 persen pada tahun 2010

¹ M Chloe Mulderig, *An Uncertain Future: Youth Frustration and the Arab Spring*, (Boston University), The Pardee Papers/No.16/April 2013.

² AfDB, *The Revolution in Tunisia: Economic Challenges and Prospect*, 11 March 2011. hal.2.

³ Noueihed, Lin, and Alex Warren, *The battle for the Arab Spring: revolution, counterrevolution and the making of a new era*. (New Haven: Yale University Press), 2013.1-348. Print, dalam Dor Srebernik, *Inequality and Corruption: Drivers of Tunisia's Revolution*, 2014, Vol.6 No.10/pg.1/2

menjadi 18,3 persen pada tahun 2011. Jumlah mereka mencapai 704.900 orang.⁴ Industri berorientasi ekspor dan investasi swasta telah meningkatkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan-tinggi yang terkonsentrasi di wilayah-wilayah pantai, sehingga meningkatkan ketimpangan regional. Dari tahun 2005 – 2009, ketimpangan, sesuai ukuran koefisien Gini, meningkat dari 38 menjadi 41. Pada Desember 2010, sebanyak 1.963 perusahaan asing mempekerjakan hampir 185.500 orang di propinsi-propinsi pantai yakni Monastir, Sfax, Mahdia, Sousse, dan Tunis Raya. Sementara, di wilayah propinsi bagian selatan dan pedalaman seperti Gafsa, Kebili, Tozeur, Kairouan, Kasserine, dan sisi Bouzid—tempat lahir revolusi 2011—sebanyak 91 perusahaan asing hanya mempekerjakan 11.200 orang.⁵

Angka pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan anak muda, menjadi penyebab pemberontakan, perlawanan di Mesir dan Tunisia.⁶ Dengan demikian, pengangguran di kalangan anak muda merupakan salah satu pemicu utama Revolusi Januari di Tunisia. Hal itu ditambah dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik yang termanifestasi dalam tingkat korupsi yang tinggi, pengangguran dan penindasan. Pemerintahan diktator dan rezim yang korup telah menghalangi munculnya sektor swasta yang dinamik dan independen yang mampu menumbuhkan pertumbuhan berkesinambungan dan pekerjaan jangka panjang.⁷

Bakar diri Bouazizi telah meledakkan protes di mana-mana di Tunisia. Pada tanggal 27 Desember 2010, protes mencapai ibu kota Tunisia, Tunis. Semula Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, yang sudah memerintah negeri itu selama seperempat abad, berusaha untuk melunakkan protes itu. Ia berjanji akan menciptakan tiga ratus ribu lapangan kerja dan pemilihan parlemen baru. Tetapi, janji tersebut tidak begitu meredakan protes. Pada tanggal 14 Januari 2011, ketika militer dan para pemimpin politik merasa semua sudah cukup, dan militer tidak mau menembaki para pemrotes, Ben Ali meninggalkan Tunisia, pergi ke Arab Saudi serta menyerahkan pemerintahan kepada karateker. Revolusi ini yang kemudian disebut Revolusi Melati (*Jasmine Revolution*).

Revolusi di Tunisia menjadi yang pertama mengguncang dan kemudian melanda Dunia Arab. Sekitar satu-setengah minggu setelah kepergian Ben Ali, anak-anak muda, banyak di antara mereka tergabung dalam organisasi yang disebut “Gerakan 6 April”, mulai menduduki Tharir Square di Kairo, Mesir. Pasukan keamanan termasuk polisi dan militer gagal mengusir mereka keluar dari Tahrir Square, dan militer menyatakan tidak akan menembak para demonstran. Pemogokan dan protes anti-pemerintah meluas ke seluruh Mesir. Pada tanggal 11 Februari, tentara mengambilalih kendali. Pada saat itu lah Presiden Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama tiga puluh tahun, terpaksa

⁴ Mohamed Siala dan Nehed Ben Ammar, *Tunisia's Revolution And Youth Unemployment*, Eurasian Journal of Economic and Fincance, 1(2),2013, hal 39-40.

⁵ Noueihed, *op.cit*

⁶ Sertan Cinar & Ismet Gocer, “The Reasons and Economic and Political Consequences of Aran Spring”, *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol 17, No.2, 2014.

⁷ Mohamed Siala dan Nehed Ben Ammar, *op.cit*, hal 39.

melepaskan kekuasaannya. Nasib yang lebih malang dan tragis menimpa pemimpin Libya, Moammar Khadafy. Ia tidak hanya disingkirkan oleh gerakan menuntut perubahan yang dilakukan rakyatnya, tetapi bahkan dibunuh oleh rakyatnya sendiri.

Namun, pengalaman masing-masing negara Arab berbeda. Di beberapa negara, militer meninggalkan rezim, loyal pada negara dan melindungi revolusi (Tunisia dan Mesir). Di Libya loyalitas individu pada keluarga dan wilayah menterup loyalitas pada militer dan negara, sehingga militer yang mapan kolaps. Militer, di Libya, loyal pada presiden, pemimpin (Moammar Khadafy). Di Suriah, loyalitas pada negara, pada rezim, kepada militer, dan pada keluarga seringkali berarti sama, jika menjadi bagian dari rezim, kemapanan dan Alawite. Yang terjadi di Suriah, sama dengan yang terjadi di Libya dan Yaman.⁸ Sejumlah demonstran berhasil “membebaskan”, menguasai bagian kota (Tahrir Square di Cairo, Mesir; Pearl Square di Manama; University Quarter di Sanaa, Yaman), atau dalam kasus Libya, seluruh wilayah negara.

Shadi Hamid dari Brookings Center for Middle East Policy di Doha berpendapat, kelima negara yang dilanda revolusi—Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, dan Yaman—memiliki satu kesamaan: Ada penguasa represif yang sangat tidak populer dan bahwa figur itu dapat mempersatukan oposisi, karena satu hal yang mereka sepakati: ‘Kami tidak menginginkannya dan kami ingin menyingkirkannya’ ...Hal itulah yang menjadi bagian kritis mengapa revolusi dapat terjadi. Tetapi, di sejumlah negara lain tidak demikian, meskipun terjadi juga demonstrasi, gerakan perlawanan. Di Bahrain, Yordania, dan Maroko, demonstrasi berhasil dilakukan dan dengan cepat pula berhasil “digembosi.” Ada kesamaan di negara-negara itu. Mereka adalah negara-negara kerajaan Arab. ‘Tidak satupun monarki yang jatuh, bahkan tidak ada monarki yang hampir jatuh, dan dengan sengaja. Menurut Shadi Hamid: Monarki memiliki bentuk struktur pemerintahan yang secara fundamental berbeda. Mereka cenderung lebih memiliki legitimasi, lebih mendapat dukungan rakyat (dan) juga lebih sulit bagi oposisi untuk menyatakan: ‘Kami ingin menyingkirkan pemimpin’ karena mereka ingin melakukan itu. Mungkin, mereka menginginkan reformasi konstitusional, tetapi karena monarki memiliki status yang tinggi (para demonstran) harus memiliki cara yang lain. Dan mengatakan, ‘Kami menginginkan monarki konstitusional’ ...hal itu kurang menarik, tidak dapat mempersatukan oposisi dan memberikan perasaan senasib seperjuangan dengan tujuan yang sama.’⁹

Dengan kata lain, negara-negara Arab republik dan monarki memiliki pengalaman yang sangat berbeda dalam revolusi. Sementara negara-negara republik menghadapi gerakan revolusioner yang berusaha menumbangkan rezim, negara-negara monarki melakukan sejumlah strategi untuk mencegah munculnya gerakan revolusioner. Negara-negara Teluk Persi yang kaya minyak menghadapi tantangan yang berbeda, dan berusaha mencari strategi yang berbeda pula untuk menghadapi gejolak. Cara mereka tentu berbeda dengan cara yang ditempuh Maroko dan Yordania, meski sama-sama monarki, tetapi tidak

⁸ Paul Danahar, *The New Middle East, The World After The Arab Spring*, (Bloomsbury, London) 2013, hal.27

⁹ Paul Danahar, *ibid.* hal.28-29

memiliki minyak yang berlimpah. Negara-negara Teluk menanggapi tuntutan rakyat tentang perlunya pemerintahan yang akuntabel dan kebebasan politik yakni dengan meningkatkan belanja untuk menciptakan lapangan kerja dan bermanfaat bagi rakyat. Beberapa negara Teluk yang lebih kecil seperti Kuwait, Qatar, dan UAE, tetapi lebih kaya, berusaha memuaskan rakyatnya. Di Oman, Sultan Qaboos menanggapi protes kaum buruh di Sohar dan Salalah, dengan menaikkan upah, memperluas jaminan sosial, dan berjanji menciptakan 50.000 lapangan pekerjaan baru. Arab Saudi menjawab ketidakpuasan rakyatnya dengan mengumumkan anggaran sejumlah 11 miliar dollar AS untuk menciptakan pekerjaan baru dan bagi santunan kepada kaum muda dan warga negara yang tidak memiliki pekerjaan. Bahkan, Raja Abdullah berjanji untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk ambil bagian dalam pemilihan dewan kota dan mengizinkan kaum perempuan ditunjuk menjadi penasihat Dewan Shura, sebagai bagian dari agenda reformasi baru. Kebijakan yang diambil Oman dan Arab Saudi (dengan menciptakan pekerjaan baru, dan memberikan jaminan sosial) dan cara represif yang dipilih Bahrain, untuk sementara waktu dapat menciptakan stabilitas. Tetapi, tidak seorang pun tahu, apakah langkah kebijakan seperti itu akan dapat menjamin terciptanya stabilitas jangka panjang.¹⁰

Semua negara Arab menyadari dan mengakui bahwa mereka perlu melakukan reformasi, pembaharuan untuk memuaskan, untuk memenuhi tuntutan rakyatnya yang menginginkan akuntabilitas yang lebih dan partisipasi publik yang lebih luas dalam pemerintahan dalam pembuatan undang-undang. Ini berarti bahwa evolusi monarki konstitusional perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi revolusi. Langkah yang diambil oleh Maroko dan Yordania, menjadi salah satu contohnya. Dua negara monarki yang miskin akan sumber daya alam itu, menjawab tuntutan rakyatnya dengan melakukan reformasi konstitusi. Kedua negara membuat kebijakan yang memberikan independensi kepada lembaga yudikatif dan membentuk pemerintahan dengan perdana menteri yang dipilih lewat pemilihan umum, tidak lagi oleh raja, serta memberikan kekuasaan kepada lembaga legislatif untuk membuat undang-undang yang sesungguhnya.

Tetapi, kiranya dorongan angin perubahan tidak hanya akan berhenti di sini. Segala hal masih bisa terjadi dan menimpa negara-negara yang selama ini lolos dari belitan “angin puting beliung” revolusi. Negara-negara itu masih akan diuji seberapa mampu mereka mengatasi persoalan ekonomi di saat dunia mengalami krisis ekonomi, dan seberapa mampu mereka menjawab tuntutan rakyatnya menyangkut masalah lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan kebebasan berpolitik yang menyangkut hak-hak dasar sebagai warga negara, sebagai manusia yang bebas dan merdeka, yang bermartabat.

¹⁰ Eugene Rogan, , “Regional Overview”, Chapter One, dalam *The Arab Spring, Implications for British Policy*, Conservative Middle East Council, October 2011, Oxford.

B. “Arab Spring”

Tidak ada konsensus tentang penyebutan gerakan yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2011. Berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi di Eropa Timur, banyak kalangan di Barat menyebut apa yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara sebagai *Arab Spring* (“Musim Semi Arab”). Tetapi, rakyat di Dunia Arab lebih senang menyebutnya sebagai *Arab Awakening* (“Kebangkitan Arab”); sebuah ekspresi dengan awal yang jelas dalam reformasi sosial, nasional, konstitusional, dan bahkan modernis Islam dari abad kesembilan belas dan awal kedua puluh. Apa pun kita menyebut gerakan itu, adalah jelas bahwa Dunia Arab telah mencapai suatu titik balik sejarah. Penolakan otokrasi mulai tahun 2011, bermula dari Tunisia dan kemudian menyapu negara-negara lain di kawasan, tidak mungkin ditarik ulang. Suatu hal yang menarik, ada kesamaan dari gerakan-gerakan di negara-negara itu. Demonstrasi sebagian besar digerakkan oleh anak-anak muda, dengan menggunakan *cell phone* dan *websites* jaringan sosial untuk mengelak dari kontrol negara. Tidak ada pimpinan yang nyata dalam banyak gerakan akar rumput ini. Mereka menggunakan slogan-slogan dan taktik yang sama, dengan mempelajari keberhasilan gerakan revolusioner di negara-negara Arab lainnya, yang bermula di Tunisia.¹¹

Musim Semi Arab, *Arab Spring* adalah gelombang demonstrasi dan protes, yang mulai pada bulan Desember 2010, dan menjadi awal tergulingnya sejumlah penguasa di sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Selama Musim Semi, empat diktator—Zine el Abidine Ben Ali (Tunisia), Muammar Khaddafi (Libya), Ali Abdullah Saleh (Yemen), dan Hosni Mubarak (Mesir)—jatuh dari kursi kekuasaannya setelah beberapa lama berkuasa.

Revolusi di Arab, yang menggunakan istilah *Arab Spring* atau *Arab Awakening*, bukanlah merupakan manifestasi pertama rakyat Dunia Arab yang memprotes dan menuntut perubahan dalam struktur sosial dan politik masyarakat Arab. Yang terjadi mulai tahun 2011, adalah gelombang ketiga revolusi massa Arab. Gelombang pertama revolusi Arab terjadi pada tahun 1914 dan disebut sebagai “Revolusi Arab Raya” (*the Great Arab Revolution*). Gelombang kedua, terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an, dan disebut dengan “Musim Semi” (*Arab Spring*), dan yang pertama kali menggunakan istilah itu adalah seorang penulis Perancis. Dalam bukunya *Un printemps arabe*, diterbitkan pada tahun 1959, Jacques Benoist-Méchin menggambarkan revolusi Arab yang terjadi di Timur Tengah “Arab”, dan berusaha menghubungkan revolusi itu dengan Revolusi Eropa yang terjadi pada tahun 1848, yang dikenal sebagai *Spring of Nations* atau *Springtime of the Peoples*.¹² Dan, *Arab Spring* yang dimulai di Tunisia, 2010, adalah gelombang revolusi ketiga Arab.

¹¹ Eugene Rogan, *ibid.*

¹² Fadi Elhousseini, “Post Arab Spring Thoughts: The Middle East between External and Internal Mechanisms”, *Hemisphere*, Vol.29, No.2, 2014.

Istilah *Arab Spring* (terjemahan dari bahasa Arab, *al-Rabi' al-Arabi*) dipopulerkan oleh media Barat pada awal 2011, setelah keberhasilan pergolakan di Tunisia melawan Presiden Zine el-Abidine Ben Ali. Revolusi di Tunisia juga sering disebut sebagai *Jasmine Revolution* (Revolusi Melati) atau *Dignity Revolution* (Revolusi Martabat). Media Barat sering menyebutnya sebagai *The Arab Awakening* (Kebangkitan Arab), *The Arab Uprising* (Pergolakan Arab), *Arab Revolts* (Pemberontakan Arab), dan *Arab Revolutions* (Revolusi Arab). Sejumlah Koran berbahasa Arab menyebutnya sebagai intifada.¹³

Ada yang mengkaitkan istilah tersebut, *Spring*, dengan pergolakan di Eropa Timur pada tahun 1989, yakni ketika rezim-rezim Komunis berjatuhan di bawah tekanan protes massa. Ketika itu, rezim-rezim komunis berjatuhan seperti efek domino. Dalam periode yang singkat, sebagian besar negara di bekas blok Komunis, meninggalkan sistem politik lama dan menggunakan sistem politik baru, demokrasi, dengan ekonomi pasar. Runtuhnya Tembok Berlin, 9 November 1989, menjadi simbol runtuhnya tembok pemisah antara Barat dan Timur, dan menandai runtuhnya kekuasaan komunisme.¹⁴

Arab Spring yang oleh para komentator internasional—dan media—disebut sebagai gerakan demokrasi rakyat yang mengalir ke bawah, yang mulai di Tunisia, menginspirasi Mesir, dan karenanya menggelorakan gerakan-gerakan di wilayah (negara) lain. Perkembangan *Arab Spring* dapat dikaitkan dengan tuntutan rakyat di kawasan itu akan demokrasi, kemerdekaan, kebebasan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan keadilan melawan rezim penindas. Tambahan lagi, nilai-nilai demokrasi seperti pluralisme, representasi politik dan respek/penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tidak dipedulikan oleh pemerintah-pemerintah di kawasan itu. Jadi penyebab umum dari pemberontakan rakyat adalah berakar pada serangkaian kondisi nyata: rezim otokratik, kurangnya institusi perwakilan, ketidakadilan yang mencolok, korupsi, distribusi sumber daya sekonomi yang tidak adil, kondisi hidup yang buruk, nepotisme, dan eksploitasi sumber daya publik oleh klas penguasa.¹⁵ Rakyat di kawasan itu, memberontak melawan pemerintah yang opresif untuk mewujudkan demokrasi, kemerdekaan, kemakmuran, memperoleh kondisi kehidupan yang lebih baik, dan penghormatan sebagai individu.

Tetapi, “sebagian besar, mayoritas pemrotes, demonstran tidak mengetahui apa-apa tentang ideologi politik. Mereka turun ke jalan, tidak karena dibakar keinginan terwujudnya pemilu yang bebas dan jujur, tetapi oleh kondisi ekonomi yang menyedihkan”.¹⁶ Demonstrasi *Arab Spring* adalah kesempatan bagi warga negara untuk menuntut pemenuhan kontrak-kontrak sosial yang dibuat dengan para pemimpin otokratik

¹³ Ibrahim N Abusharif, *Parsing “Arab Spring”*, (Northwestern University in Qatar), February 2014.

¹⁴ Primoz Manfreda, *Definition of the Arab Spring*, November 25, 2014

¹⁵ Shibley Telhami, “Egypt, Tunisia, and Iran”, *Digest of Middle East Studies*, 20, Spring 2011; Lisa Anderson, “Demystifying the Arab Spring”, *Foreign Affairs*, 90, May/June 2011; Jeremy Bowen, *The People Want The Fall of The Regime, The Arab Uprisings*, 2012, (Simon&Schuster, London).

¹⁶ John Bradley, *After the Arab Spring: How Islamist Hijacked The Middle East Revolts*, (Palgrave/MacMillan, New York), 202.

mereka, dan semestinya dipandang sebagai tidak hanya perjuangan politik, tetapi juga perjuangan ekonomi dan kultural.¹⁷ Demikian, pendapat M Chloe Muldering.

Pendapat M Chloe Mulderig tersebut menegaskan bahwa *Arab Spring* dipicu oleh kesulitan ekonomi dan aspirasi demokratik rakyat.¹⁸ Isu ini didasarkan atas ketimpangan pendapatan, kemiskinan yang meluas, korupsi, nepotisme, dan pewarisan kekuasaan pemerintah dari ayah ke anak dan kurangnya aspirasi rakyat di dalam pemerintahan.¹⁹

Revolusi di Arab terjadi di klaster negara-negara yang secara geografis berdekatan. Maka terjadi semacam “penularan” dan “domino” dari negara satu ke negara yang lain. Hal tersebut terjadi karena kemajuan teknologi komunikasi. Penyebaran teknologi komunikasi membuat orang-orang Arab, terutama kaum mudanya, lebih mampu mengekspresikan diri, lebih menginginkan untuk terlibat dalam aktivitas politik, dan lebih tangkas dalam organisasi politik. Mereka juga menyingkirkan sisa-sisa legitimasi lama militer, partai, dan bentuk-bentuk otokrasi monarkial. Dengan kata lain, *Arab Spring* juga sebuah momen historis, bersejarah, yang mengubah Dunia Arab. *Arab Spring* juga sebuah momen historis dalam politik Timur Tengah, sampai sekarang, akibatnya tetap tidak dapat diperkirakan. Misalnya, berkaitan dengan krisis Suriah dan meluasnya ancaman ISIS.

C. Kasus-kasus

Seorang akademisi Lebanon, Mohamad Ali-Moukaled menulis artikel di harian *Al Hayat* (27 Agustus 2011) dengan judul “The Arab Spring is Their Revolution Two Centuries After the Enlightenment”. Dalam artikelnya itu Moukaled antara lain menulis, sebelum revolusi Tunisia, Dunia Arab pada umumnya menolak peradaban moderen, terutama kapitalisme. Kesenkungannya, Dunia Arab ketinggalan gelombang sejarah sekitar dua abad. Tetapi, setelah revolusi negara-negara di Dunia Arab menyadari perlunya ada perubahan.

Gelombang perubahan itu menyapu sejumlah negara Arab dan Afrika Utara, mulai tahun 2011: Tunisia, Mesir, Libya, Bahrain, Oman, Suriah, Maroko, Yaman, dan Yordania. Beberapa pemimpin negara yang disapu angin perubahan, jatuh: Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi (14 Januari 2011), Presiden Mesir Mohamad Hosni Mubarak mundur (11 Februari 2011), pemimpin Libya Moammar Khadafy, ditangkap dan dibunuh pemberontak di Sirte (20 Oktober 2011), Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Abd Rabbuh Mansur

¹⁷ M Chloe Mulderig, op.cit. hal.3

¹⁸ Stephen, A. & Linz, JJ (2013) Democratization theory and the “Arab Spring”, *Journal of Democracy*, 24(2), pp.15-30).

¹⁹ Desai, RM., Olo fsgard, A.& Yousef, T. (2011) *Is the Arab Authoritarian Barga in Collapsing?*,(Brooking Institute).

Al-Hadi (23 November 2011), penguasa Bahrain selamat karena campur tangan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Meskipun revolusi tidak dapat mewujudkan seluruh tujuan dari revolusi, tetapi apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir (serta Libya), menegaskan bahwa revolusi di negara-negara itu bermula dari proses pergolakan, perlawanan dan berakhir dengan penumbangan regime yang berkuasa dan simbol-simbolnya. Memang, banyak yang berharap bahwa capaian revolusi tidak hanya itu, tetapi juga mencakup pada perubahan kultur dan ekonomi. Hal itulah yang sekarang tengah terjadi.

Masing-masing negara yang dilanda revolusi Arab Spring memiliki pengalaman yang berbeda-beda, meskipun dalam beberapa hal sama, demikian pula akibat dari revolusi tersebut juga berbeda-beda. Revolusi Arab Spring yang pertama kali terjadi di Tunisia, terjadi sekitar dua tahun setelah krisis ekonomi pada tahun 2008. Kondisi itu bertambah parah karena institusi-institusi politik lemah dan garis yang memisahkan penguasa, partai yang berkuasa, dan institusi-institusi yang berkuasa (dari kongres partai dan "parlemen" sampai militer dan dinas intelijen), seringkali kabur. Dalam banyak kasus, perwakilan rakyat tidak dapat berdaya. Dalam banyak kasus kekuasaan mereka terbatas. Inilah sebabnya, rakyat di negara-negara itu turun ke jalan sebagai pilihan pertama mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa sebagian besar slogan selama pergolakan adalah "Turunkan nizam" (regim, sistem, orde, golongan) dan bukannya "Turunkan pemerintah!"²⁰

Itulah sebabnya, tuntutan akan demokratisasi dan penegakan hak-hak asasi manusia menjadi tuntutan politik yang utama dari para demonstran (meskipun, seperti sudah disebut di atas, tuntutan ekonomi juga memainkan peran utama). Satu hal yang pasti, transisi ke demokrasi selalu diwarnai dengan ketidakpastian. Hal itu juga dialami oleh Tunisia dan Mesir (sementara negara-negara lainnya, seperti Suriah, Libya, dan Yaman, masih belum selesai, masih bergulat untuk mencari titik temu mengakhiri konflik).

C.1. Tunisia dan Mesir

Tunisia dan Mesir, secara sepiantas memiliki sejumlah perbedaan. Mesir adalah negara berpenduduk terbanyak di Dunia Arab. Jumlah penduduk Mesir diperkirakan 81 juta (bahkan mungkin mencapai 100 juta, karena wajib militer, tidak semua keluarga mencatatkan kelahiran anak-anaknya). Tunisia, berpenduduk sekitar 10,5 juta jiwa. Secara luas wilayah pun berbeda. Luas wilayah Mesir enam kali lebih besar dibanding Tunisia. Sementara itu, orang-orang Tunisia, rata-rata, lebih kaya dibanding orang-orang Mesir (*income* per kapita mereka hampir dua kali penghasilan orang Mesir). Dan Bank Dunia mengklafifikasi lebih dari 80 persen penduduknya adalah "kelas menengah." Di Mesir, sebaliknya, sekitar 40 persen dari penduduknya hidup dengan penghasilan kurang dari dua dollar AS per hari. Tunisia juga lebih *urbanized* (67 persen penduduknya, sementara Mesir

²⁰ James L. Gelvin, *The Arab Spring, What Everyone Needs to Know* (Oxford University Press), 2012. Hal.23-24

43 persen) dan “lebih Eropa.”²¹ Meskipun demikian, ada kesamaan juga di antara kedua negara. Penduduk baik Tunisia maupun Mesir, sama-sama relatif homogen. Hampir 98 persen penduduk Tunisia adalah Arab Sunni; sementara sekitar 90 persen penduduk Mesir adalah Arab Sunni (sisanya terutama adalah Kristen Koptik).

Tunisia melalui guncangan politik seimik yang membawa pada kehancuran regim otokratik di bawah pimpinan Ben Ali dan menjadi awal transisi ke demokrasi. Dibandingkan negara-negara lainnya, Tunisia yang menjadi pengobar pertama *Arab Spring*, dapat dikatakan melalui jalan relatif mulus. Berbeda dengan Mesir, tidak hanya masyarakat warga tetapi juga *political society* mulai berkembang di Tunisia. Masyarakat warga dapat memainkan sebuah peran vital dalam penghancuran rezim otoritarian, tetapi untuk pembangunan demokrasi, dibutuhkan lembaga/masyarakat politik. Dengan kata lain, harus ada kelompok-kelompok aktivis politik yang terorganisasi yang tidak hanya demonstrasi melawan kediktatoran, tetapi juga bicara di antara mereka sendiri tentang bagaimana mereka dapat mengatasi ketakutan mereka bersama dan keahlian “*rules of the game*” untuk alternatif demokratik.²²

Tunisia memilih “jalan” yang berbeda dengan negara-negara lain yang disapu revolusi. Konsep bernegara yang menjadi penting di Tunisia adalah bukan “sekularisme”, sebagaimana (di dalam bahasa Arab untuk sekularisme adalah *almaniyah*, yang anda nuansa anti-agama) tetapi lebih merupakan konsep negara sipil (*dawla madaniyah*), sebagai pengganti negara agama. Di dalam negara sipil (*civil state*), agama menghormati prerogatif demokrasi—kedaulatan rakyat dan mereka membuat hukum, undang-undang. Namun, negara sipil juga menghormati beberapa prerogatif agama dan peranan sahnya dalam masyarakat. Inilah yang oleh Alfred Stepan disebut sebagai “*twin tolerations*.”²³

Hal tersebut bisa dicapai karena kaum liberal sekular dan Islamis, karena secara rutin bertemu dan membahas masalah itu. Pertemuan tersebut, bahkan, sudah dilakukan sejak delapan tahun sebelum Ben Ali jatuh. Sejak saat itulah mereka mulai membentuk sebuah masyarakat politik (*political society*). Hal seperti itu tidak terjadi di Mesir. Barangkat dari sinilah, Partai Ennahda Islamis menjadi lebih moderat dan cenderung membentuk tatanan/orde politik sipil, dan ini berbeda dengan yang terjadi di Mesir. Keinginan Ennahda untuk melakukan dialog konstruktif dengan kaum sekular dalam penyusunan konstitusi, dipandang sebagai faktor utama di balik transisi demokrasi. Dengan demikian, pemisahan yang tajam antara kaum Islamis dan Sekularis, menjadi samar, karena mereka memiliki kepentingan yang sama, sepanjang sejarah melalui keanggotaan mereka

²¹ James L. Gelvin, *Ibid*, 2012. Hal. 34-37

²² Alfred Stepan and Juan J. Linz, “Democratization Theory And The ‘Arab Spring’”, dalam *Journal of Democracy*, April 2013, Volume 24. Number 2 .

²³ Alfred Stepan, “Tunisia’s Transition And The Tolerations”, dalam *Journal of Democracy*, April 2012, Volume 23, Number 2.

dalam serikat buruh.²⁴ Mereka sama-sama tergabung dalam Serikat Buruh Umum Tunisia (Tunisian General Union of Labour/UGTT), sejak tahun 1946 ketika mereka bersama dengan Habib Bourguiba berjuang untuk merebut kemerdekaan dari Perancis (1956).

Selama revolusi 2011, banyak kaum Islamis yang menjadi anggota serikat buruh lokal dan memprotes. Hal tersebut semakin mengaburkan pemisahan antara Islamis-Sekularis. Karena tidak dapat mengorganisasi diri sebagai partai Islamis, banyak di antara mereka yang memprotes Ben Ali dengan cara bergabung dengan serikat buruh lokal dan sindikat profesional sehingga mereka menyatu dengan revolusi.²⁵ Mereka tergabung menjadi anggota serikat buruh tambang, wartawan, guru, pengacara, dan dokter. Tujuan mereka—baik kaum agamis maupun sekularis—sama melawan ketidakadilan, korupsi, ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan kolusi serta nepotisme.

Ketimpangan ekonomi saja tidak dapat menjadi penyebab penggulingan rezim, tetapi membutuhkan tambahan koalisi pendukung kudeta yang tegas, yang menentukan. Memang, ketimpangan saja, mungkin membahayakan rezim yang berkuasa. Tetapi, hal itu tidak cukup untuk terjadi pergantian rezim. Menurut Nancy G Bermeo, ketimpangan ekonomi harus dilengkapi dengan koalisi pendukung kudeta yang memiliki baik kehendak dan kemampuan untuk menggulingkan rezim yang berkuasa.²⁶

Dalam kasus Tunisia, “koalisi pendukung kudeta” adalah terdiri atas UGTT, serikat buruh lokal dan militer melengkapi ketimpangan ekonomi sebagai faktor utama yang menjadi pendorong runtuhnya rezim Ben Ali. Semula UGTT nasional dikooptasi oleh rezim Ben Ali, tetapi ketika Ben Ali tampaknya tidak dapat lagi didukung untuk tetap berkuasa, mereka mengubah dukungannya pada serikat buruh lokal yang menentang rezim Ben Ali. Kebijakan serupa dilakukan pula oleh militer, yang menolak untuk mendukung Ben Ali. Sejak itu terbentuklah koalisi antara aktivis lokal, serikat buruh, militer dan UGTT. Koalisi ini meyakinkan Ben Ali untuk mengambil putusan, meninggalkan kursi kekuasaannya dan juga meninggalkan Tunisia.

Pada akhirnya, setelah perjalanan panjang, masa transisi Tunisia yang sudah berlangsung selama empat tahun, dimahkotai dengan disahkannya konstitusi baru pada bulan Januari 2014 dan pemilu nasional antara bulan Oktober dan Desember 2014. Konstitusi baru lahir dari pergulatan dan perdebatan panjang dan sengit di antara faksi-faksi politik di Majelis Konstituante Nasional. Teks konstitusi mencerminkan proses yang kompleks bagaimana mengatasi perbedaan-perbedaan di masyarakat. Pada akhirnya disepakati bahwa “Tunisia adalah negara sipil berdasarkan kewarganegaraan, kehendak rakyat, dan supremasi hukum,” (Pasal 2), dan Pasal 3 menyelaskan tentang kedaulatan rakyat; kebebasan berkeyakinan dan kesamaan gender (Pasal 6); kebebasan berekspresi dan informasi (Pasal 31-32); kebebasan berkumpul (Pasal 37). Selain itu, dalam konstitusi

²⁴ Dor Srebenik, “Inequality and Corruption: Drivers of Tunisia’s Revolution”, dalam *Studen Pulse*, 2014, Vol.6 No.10

²⁵ Lin Noueihed dan Alex Warren, *The battle for the Arab Spring: revolution, counterrevolution and the making of a new era*. (New Haven: Yale University Press), 2013.

²⁶ Nancy G Bermeo, “Poverty, Inequality, and Democracy: Does Electoral Democracy Boost Economic Equality?” *Journal of Democracy*, 20.4 (2009): hal. 21-35

juga ditegaskan tentang identitas Muslim Tunisia. Misalnya, dalam Pasal 1, dinyatakan bahwa “agama Tunisia adalah Islam, bahasanya Arab, dan sistemnya Republik”.²⁷ Konsitusi tersebut mencerminkan kemenangan partai sekularis, Nidaa Tounes (Seruan Tunisia), yang menguasai kursi di parlemen, dan pemimpinnya Béji Caïd Essebsi sebagai presiden terpilih. Meski demikian Al Nahda atau Ennahda (Kebangkitan atau Kebangunan Kembali), tetap merupakan blok terbesar kedua di parlemen, dan bersama Nidaa Tounes, berkoalisi, membentuk pemerintahan baru Tunisia.

Sementara itu, Mesir melalui jalan yang berbeda, meskipun dalam beberapa hal sama. Mesir sudah mengalami tiga kali revolusi besar yang mengubah negara itu sejak awal abad ke-20. Pertama terjadi pada tahun 1919, lalu Gerakan Perwira Bebas pada tahun 1952, dan ketiga adalah *Arab Spring* 2011 atau sering pula disebut sebagai Revolusi Tahrir Square.²⁸ Selama dua abad, Mesir merupakan pusat intelektual, pusat kultural yang menentukan, dan *role model* politik di antara negara-negara Arab. Setiap perkembangan politik di Mesir akan berdampak, berpengaruh pada negara-negara Arab yang lain. Karena itu, ketika terjadi pergolakan, revolusi di Tunisia, otokrat Mesir, Mohammad Mosni Mubarak, memiliki keyakinan bahwa negaranya tidak akan mengalami seperti yang dialami negara kecil di Afrika utara itu, Tunisia.

Akan tetapi, situasi dan kondisi di Mesir sudah seperti “hamil tua,” sehingga muncul pertanyaan, “Mengapa rakyat Mesir tidak memberontak?” Seluruh kondisi di Mesir sudah matang untuk terjadinya revolusi. Hosni Mubarak memonopoli kekuasaan selama 30 tahun lewat pemilu curang dan mempersiapkan anaknya, Gamal, untuk menjadi penerusnya. Tingkat korupsi di lingkungan pemerintah belum pernah terjadi sepanjang sejarah Mesir. Sekelompok kecil pengusaha, terutama kawan-kawan Gamal Mubarak, menguasai sepenuhnya ekonomi dan mengendalikan semua itu untuk kepentingan mereka sendiri. Empat puluh juta rakyat Mesir, yang berarti separoh penduduk negeri itu, hidup di bawah garis kemiskinan, penghasilan mereka per hari kurang dari dua dollar. Mesir mengalami kemerosotan dalam segala hal: mulai dari kesehatan masyarakat dan pendidikan hingga ekonomi dan kebijakan luar negeri. Segelintir orang kaya hidup layaknya raja-raja di istana dan resort-resort, ke mana-mana menggunakan pesawat pribadi, sementara orang-orang miskin tidak dapat menopang kebutuhan keluarganya, memilih bunuh diri atau kadang mati kelaparan. Polisi telah menjadi alat pemerintah paling kejam di dunia. Setiap hari, banyak rakyat yang disiksa di kantor-kantor polisi.²⁹

Ketika pada akhirnya revolusi pecah, mulai 25 Januari 2011, dipandang oleh banyak pihak sebagai “semestinya harus terjadi.” Meskipun, menurut Noha Bakr dalam *The Egyptian Revolution*, sebetulnya, kondisi ekonomi dan sosial bisa dikatakan tidak

²⁷ Alexis Arieff and Carla E Humud, *Political Transition in Tunisia*, Congressional Research Service, USA, February 10, 2015.

²⁸ Trias Kuncahyono, *Tahrir Square, Jantung Revolusi Mesir*, (Penerbit Buku Kompas, Jakarta), 2013; dan Anthony F Lang Jr. “From revolutions to constitutions: the case of Egypt”, *International Affairs* 89:2 (2013) 345-363.

²⁹ Alaa Al Aswany, *On The State of Egypt, What Made The Revolution Inevitable*, (Vintage Book, New York, USA), 2011.

begitu jelek. Tetapi, persoalannya adalah adanya ketimpangan, ketidakadilan. Jurang antara orang kaya dan miskin begitu lebar. Dan, kemakmuran itu tidak menetes ke bawah. Karena itu, tuntutan para demonstran selain Mubarak mundur adalah menuntut ditegakkannya keadilan sosial.

Pada tataran nasional, ada beberapa alasan politik sehingga terjadilah revolusi 25 Januari 2011. Pertama, pelanggaran hak-hak asasi manusia dirasakan begitu tinggi. Para demonstran dihadapi dengan kekerasan (sebelum revolusi), dan bahkan pemerintah memberlakukan undang-undang darurat. Demonstrasi di Al Mahalla (6 April 2008), mendukung kenaikan upah minimum dan menentang kenaikan harga pangan, menelan korban jiwa.³⁰ Termasuk penyiksaan terhadap Khaled Said oleh polisi di Aleksandria yang membakar kemarahan anak muda. Sebenarnya gerakan melawan Mubarak sudah dimulai sejak tahun 2005, setelah Mubarak untuk kelima kalinya (satu masa jabatan adalah enam tahun) terpilih sebagai presiden. Sejak itu muncullah Gerakan Mesir untuk Perubahan atau yang dikenal dengan nama *Kefaya* atau *Kifaya* yang berarti "Cukup." Gerakan ini dimotori oleh sejumlah partai yang menuntut perubahan.³¹

John R Bradley dalam *Inside Egypt, The Land of The Pharaohs on The Brink of Revolution* (2008) menyebut *Kifaya* sebagai gerakan pro-demokrasi pertama yang menyerukan penyingkiran rezim Mubarak secara damai. Jeremy Bowen, menyatakan gerakan ini dibentuk oleh kaum intelektual kelas menengah. Rabab El-Mahdi dalam "The Democracy movement: cycles of protest" (*Egypty, Movement for Change*, dengan editor Rabab El-Mahdi dan Philip Marfleet, 2009), menulis pada tahun 2004, para aktivis demokrasi mulai mempersoalkan hegemoni rezim Mubarak. Mereka, sekitar 300 intelektual dari berbagai latar belakang ideology (Carnegie Endowment for International Peace, 2010), membentuk "Egyptian Movement for Change" (el-Haraka el-Masreyya menagl el-Taghyeer) yang dikenal dengan nama *Kefaya*, pada bulan November 2004.³²

Kedua, kurangnya toleransi terhadap kaum minoritas memunculkan kekecewaan besar. Di Mesir, misalnya, terjadi penyerangan dan perusakan terhadap biara Kristen Koptik, tetapi tidak ada tindakan berarti dari sistem (pemerintah). Pada malam jelang Tahun Baru 2011, Gereja Dua Orang Kudus di Aleksandria menjadi sasaran teroris, dibakar. Aksi terorisme itu menewaskan 23 orang. Semuanya orang Kristen Koptik. Sebanyak 97 orang atau malahan lebih terluka. Ini merupakan serangan yang paling mematikan terhadap kaum minoritas Kristen Koptik Mesir sejak pembantaian Koshes pada tahun 2.000 yang menelan korban jiwa 21 orang Kristen Koptik. Kaum Kristen Koptik, pada umumnya mendukung rezim Mubarak, yang dijadikan rintangan melawan kaum fundamentalis di Mesir. Tetapi, selama beberapa tahun terakhir terjadi peristiwa tahun 2011, terjadi banyak tindak kekerasan terhadap umat Kristen Koptik.

³⁰ Trias Kuncahyono, op.cit. hal. 92-96.

³¹ Nadia Oweidat, Cheryl Benard, Dale Stahl, Walid Kildani, Edward O'Connell, dan Audra K. Grant, *The Kefaya Movement, A Case Study of a Grassroots Reform Initiative*, (Rand National Defense Research Institute, Santa Monica, California), 2008. Hal.1-54.

³² Trias Kuncahyono, op.cit. hal.84-88.

Ketiga, sistem pewarisan kekuasaan yang dibangun oleh Mubarak. Mubarak yang terpilih kelima kalinya pada tahun 2005, akan menjabat hingga tahun 2011. Ia telah merencanakan cara, agar setelah tahun 2011, anaknyalah yang akan menggantikannya. Dengan cara seperti itu, tertutuplah peluang untuk persaingan. Keempat, hasil Pemilu Parlemen 2010, yang dimenangi oleh Partai Demokratik Nasional (NDP) partai yang berkuasa, ditengarai penuh kecurangan. Kelima, terjadi salah kelola dalam krisis, yang dimulai ketika regim gagal melakukan reformasi konstitusional 2005-2007, dan tidak membuka sistem politik untuk memberikan tempat bagi kaum muda dan kelas menengah baru. Kesemuanya itu, lima alasan mengapa terjadi revolusi di Mesir, seperti dikemukakan oleh Noha Bakr, seperti mendapat bahan bakar, mendapatkan momentum, ketika terjadi revolusi di Tunisia yang berhasil menyingkirkan Ben Ali.

Setelah pada akhirnya Mubarak jatuh, turun dari kursi kekuasaannya yang sudah diduduki selama 30 tahun, Mesir memasuki babak baru. Dikatakan babak baru, karena setelah revolusi muncullah lima kekuatan utama politik di Mesir, yang sebelumnya terpusat pada Mubarak. Kelima kekuatan politik itu adalah **pertama**, partai-partai politik; **kedua**, militer; **ketiga**, orang-orang dan jaringan bekas partai berkuasa NDP; **keempat**, demonstran; dan **kelima**, mayoritas rakyat yang diam (*silent majority*). Kelima kekuatan inilah yang memainkan peran penting di Mesir pasca-revolusi. Kita melihat bahwa terjadi pertarungan, persaingan, dan juga kerja sama untuk memperebutkan kekuasaan. Yang pada akhirnya dimenangi oleh militer. Ini yang tidak terjadi di Tunisia. Bahkan, pasca Revolusi 25 Januari, militerlah—Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata/the Supreme Council of the Armed Forces/SCAF--yang memegang tampuk kekuasaan di Mesir, sampai digelarnya pemilu umum pertama pasca-revolusi. Yang menarik adalah, rakyat menyambut hal itu dengan meneriakkan dukungan, “Tentara dan rakyat bersatu,” dan media milik pemerintah mengumandangkan lagu-lagu nasional tahun 1960-an era Nasser. SCAF, ternyata tidak hanya memegang kekuasaan selama enam bulan, tetapi satu setengah tahun, hingga Juni 2012. Selama periode itu, SCAF menguasai institusi-institusi negara, termasuk media, birokrasi, aparat keamanan, dan kehakiman. SCAF menempatkan para pensiunan perwira di pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah dikuasai militer. Selain itu, di bidang politik, SCAF menjalin aliansi erat dengan Persaudaraan Muslim (*Muslim Brotherhood*) dan organisasi-organisasi Islamis lainnya. Melalui aliansi ini, kelompok Islamis memenangi mayoritas dalam pemilihan presiden dan parlemen (2012), dan militer tetap mempertahankan dan melindungi serta memperoleh hak-hak istimewa dalam politik dan ekonomi yang diwariskan oleh Mubarak.

Yang menarik adalah mengapa pada akhirnya, militer menyingkirkan, lewat kudeta militer, Presiden Mohammad Morsi yang sebelumnya didukung? Media internasional dan para analis menyebutnya sebagai “kudeta militer”, tetapi sebagian besar rakyat Mesir justru menyebutnya sebagai “revolusi kami.” Setelah demonstrasi besar-besar diseluruh negeri, 30 Juni 2013, sebagian besar rakyat Mesir mengharapakan militer menjalankan tugas nasionalnya dan menyelamatkan negara dari kehancuran ekonomi. Militer menanggapi

tuntutan rakyat itu, dan membentuk koalisi dengan beberapa partai politik dan tokoh-tokoh publik untuk menyingkirkan Morsi, 3 Juli 2013. Militer memutuskan untuk menyingkirkan Morsi. Padahal, selama Morsi berkuasa, Persaudaraan Muslim memberikan hak-hak istimewa dalam bidang politik dan ekonomi kepada militer bahkan dalam konstitusi. Jenderal Abd al-Fatah al-Sisi, menteri pertahanan saat itu sudah menyatakan tidak akan mencampuri urusan politik, tetapi lebih menjalankan tugas kewajibannya melindungi negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Jadi sangat menarik bahwa pada akhirnya militer berpihak pada partai-partai politik dan kaum muda yang sebelumnya selalu menentang hak-hak istimewa yang dinikmati militer.³³

Tetapi, militer telah mengambil keputusan dan sikap untuk menyingkirkan Morsi. Karena, militer mengklasifikasikan Persaudaraan Muslim (pendukung utama Morsi) sebagai organisasi teroris internasional yang ambil bagian dalam struktur kekuasaan, mengancam keamanan nasional. Dua pekan sebelum disingkirkan, Morsi tanpa persetujuan militer, menyatakan jihad internasional di Suriah. Pernyataan tersebut telah menjadi penyebab terjadi kerusuhan sektarian di Mesir. Dalam proses penyingkiran Morsi itu, al-Sisi melakukan perhitungan teliti dan hati-hati untuk meyakinkan bahwa ia tidak akan kehilangan dukungan di front internal, regional, dan internasional. Di front internal, ia menderia dukungan penuh dari massa, yang takut kembalinya terorisme. Massa rakyat membandingkan al-Sisi dengan Nasser. Ia juga menerima dukungan dari berbagai partai politik yang tidak keberatan dengan bisnis militer dan naiknya status mereka. Di tingkat regional, al-Sisi mendapat dukungan dan bantuan uang miliaran dollar AS dari negara-negara Teluk Arab yang tidak suka dengan skema regional Persaudaraan Muslim, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Secara internasional, meskipun AS menanggukuhkan sebagian bantuan militer kepada Mesir, Washington tidak menggunakan istilah “kudeta militer” untuk menyebut intervensi militer di Mesir. Sikap AS tersebut jelas menunjukkan posisi terhadap langkah militer Mesir pimpinan al-Sisi menyingkirkan Morsi, dan menyatakan Persaudaraan Muslim sebagai organisasi teroris.³⁴

Sejak itu, kekuasaan kembali ke tangan militer lagi. Keterlibatan militer dalam politik dan bisnis memiliki sejarah panjang. Militerisasi negara Mesir dan ekonomi bermula sejak tahun 1952, setelah terjadi kudeta militer pimpinan Gamal Abd al-Nasser, terhadap Raja Faraouk. Ketika itu, Nasser sebagai presiden (1954-1970) membentuk regim sosialis dan memberikan tempat kepada sejumlah perwira untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan dan ekonomi. Anwar Sadat yang menggantikan Naser berusaha mengeluarkan militer dari pemerintahan, demiliterisasi, dan menjadikan militer benar-benar fokus pada perang. Pengganti Anwar Sadat, Hosni Mubarak (berkuasa, 1981-2011) mengembalikan kembali militer ke pemerintahan dan bisnis.

³³ Zeinab Abul-Magd, *The Egyptian military in politics and economy: Recent history and current transition status*, (Chr. Michelson Institute), Oktober 2013. No.2

³⁴ Zeinab Abul-Magd, *ibid.* hal. 3-5.

Inilah yang sangat membedakan antara Tunisia dan Mesir. Ketika Tunisia sudah bisa keluar dari “krisis” dan mulai menata hari depan, Mesir masih berkatut dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan “cita-cita revolusi *Arab Spring*.” Meskipun, militer membentuk komite yang mengamandemen Konstitusi 2012, yang sering disebut Konstitusi Persaudaraan Muslim. Penyusunan konstitusi baru melibatkan banyak pihak termasuk para wakil dari partai politik berhaluan liberal, kiri, Islamis, dan para wakil dari serikat buruh, gerakan kaum muda, perempuan, Nubian, Koptik, dan Beduin. Komite juga membahas pemikiran-pemikiran yang dianggap liberal dan perlindungan terhadap kaum minoritas agama serta perempuan.

C2. Libya, Tunisia, dan Yaman

Khaled Fahmy, seorang analis politik dari Mesir yang terlibat dalam revolusi di Tahrir Square, mengajukan pertanyaan menarik: Mengapa perubahan mulus, setahap demi setahap dalam *Arab Spring* berubah menjadi mimpi buruk bagi Arab? Khaled Fahmy tidak memberikan jawaban tegas, tetapi menyebutkan lima “persoalan berat” yang harus dimengerti dan diatasi agar proses perubahan terus berjalan. Kelima hal itu mulai dari bencana petro-dollar hingga masalah eksistensial yang sangat dalam mengenai peranan agama dalam politik.³⁵

Pertanyaan Khaled Fahmy menarik: mengapa *Arab Spring* menjadi mimpi buruk bagi Arab? Mimpi buruk memang dialami oleh para penguasa di negara-negara yang disapu *Arab Spring*. Apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir berbeda dengan apa yang terjadi di Libya dan Yaman, juga Suriah. Di Tunisia dan Mesir, sejak semula tentara berkomitmen untuk tidak melakukan tindak kekerasan. Di kedua negara itu, militer sejak semula memandang diri mereka sebagai instrumen dari negara, sehingga mereka memilih meninggalkan rezim untuk melindungi rakyat. Sebaliknya di Libya, Yaman, dan Suriah, tentara malah digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk menghadapi para demonstran dengan cara kekerasan. Jika tentara tidak memiliki “investasi” baik di negara atau rezim yang berkuasa, maka militer akan ambruk, hancur seperti yang terjadi di Libya. Jika militer tidak hanya instrument dari rezim, tetapi membantu membangun negara, maka militer akan membunuh rakyat untuk melindungi rezim dan negara. Bila demikian, maka rakyat akan bergerak tidak hanya ingin mendongkel, menyingkirkan rezim yang berkuasa, tetapi mereka juga ingin menyingkirkan negara, karena mereka adalah sama. Itulah yang terjadi di Suriah. Menurut Lisa Anderson, profesor hubungan internasional dari Universitas Amerika di Kairo, militer Tunisia dan Mesir disiapkan untuk mengorbankan rezim, sebab mereka adalah pelindung negara.³⁶

³⁵ Raja Shehadeh dan Penny Johnson (ed), *The Unravelling of the Old Order in the Middle East, Shifting Sands*, (Profile Books LTD, London), 2015, hal. 6-13.

³⁶ Paul Danahar, op.cit, hal.25; James L Gelvin, op.cit, hl. 77.

Ada kesamaan antara Libya dan negara-negara lain yang merupakan asal-muasal *Arab Spring* dan yang secara bertahap berubah menjadi *Arab Awakening*. Meski demikian, ada perbedaannya juga. Libya memiliki cadangan hydrocarbon sangat banyak, cadangan minyaknya dikenal sebagai yang lapng besar dan cadangannya gasnya terbesar kedua di Afrika, dan oleh karena itu relatif lebih kaya dibandingkan Mesir, Suriah, Tunisia, dan Yaman. Yang berbeda dengan negara lain seperti Mesir adalah di Mesir partai-partai politik, serikat buruh, dan masyarakat madani ada di zaman Hosni Mubarak. Sebaliknya, pada permulaan revolusi, di Libya masyarakat madani tidak ada, karena rezim Khadafy secara sistematis menghancurkan organisasi-organisasi sipil. Secara demografis ada perbedaan antara Libya dan Mesir. Penduduk Libya homogen, hampir 100 penduduknya Muslim Sunni; sementara di Mesir ada banyak agama (Kristen Koptik, Muslim Sunni, dan minoritas Muslim); Suriah juga beragam (Alawite, Muslim Syiah dan Sunni). Karena homogen itu, maka gerakan fundamental dan organisasi radikal seperti Al-Qaeda di zaman Khadafy tidak begitu mendapat dukungan, tidak seperti di Mesir kelompok seperti itu mendapat tempat (Persaudaraan Muslim, Salafis) sebelum revolusi dan sebentar setelah revolusi; Tunisia (Ennahda, Al Qaeda di Maghreb), Yaman (Al Qaeda di Semenanjung Arabia). Orang-orang Libya secara alamiah religius dan karena itu mendukung negara Islam, tetapi tidak yang radikal. Yang juga berbeda dengan Tunisia, Mesir, dan Suriah adalah identitas kesukuan di Libya (juga di Yaman) tetap kuat. Rivalitas antar-suku inilah yang antara lain memberikan sumbangan instabilitas dan konflik di Libya setelah revolusi.³⁷

Banyak hal yang mendorong terjadinya pergolakan atau perlawanan terhadap rezim yang berkuasa di Libya dan Yaman. Baik di Yaman maupun Libia, despot yang sudah lama berkuasa, korup (Ali Abdullah Saleh di Yaman dan Muammar Khadafy di Libya) membuat tak berdaya kehidupan warga dan ekonomi, menganggap dirinya raja dan negara dianggap sebagai miliknya sendiri. Penguasa di kedua negara itu otoriter, mengekang kehidupan politik rakyatnya, tidak memberikan kebebasan, banyak melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Mereka ingin bahwa kursi kekuasaannya diberikan kepada anaknya, tetap jatuh ke tangan anggota keluarganya (ini juga diinginkan oleh Hosni Mubarak; bahkan sudah terjadi di Suriah). Karena korupsi dan juga salah urus, Yaman berstatus sebagai negara paling miskin di Dunia Arab, dengan angka pengguran 35 persen dan 50 persen penduduknya buta huruf.

Yaman, misalnya, justru memasuki babakan suram setelah *Arab Spring*. Negeri itu masih dibelit perang saudara yang melibatkan kekuatan asing: Arab Saudi dan Barat serta Iran. Negara itu terpecah antara gerakan Huthi yang disebut sebagai proksinya Iran dan koalisi anti-Huthi dukungan Barat dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang dipimpin Arab Saudi. Koalisi ini mendukung Presiden Abdo Robo Mansour Hadi. Pada saat yang bersamaan, mantan Presiden Ali Abdullah Saleh (diturunkan 2011), yang ingin terlibat lagi

³⁷ Ronald Bruce St John, *A Transatlantic Perspective on The Future of Libya*, The German Mashall Fund of the United States, 2012.

dalam politik lewat pertainya Kongres Rakyat Umum (General People's Congress/GPC) bermain mata, kerja sama dengan Huthi, menghadapi Hadi. Selain, itu ada kelompok ketiga yang membuat situasi di Yaman tambah pelik, yakni Al-Qaeda yang bersama gerakan Negara Islam (IS), mengambil keuntungan dari keadaan negara yang rapuh.³⁸

Empat hari setelah tumbangnya Hosni Mubarak, pecah gerakan melawan rezim yang berkuasa di Libya. Pergolakan pertama kali muncul pada pertengahan Januari 2011 di al-Bayda, sebelah timur Benghazi. Yang menjadi fokus demonstrasi adalah soal pelanggaran hak-hak asasi manusia, salah kelola progam sosial, dan korupsi, pengekangan politik, dan pada akhirnya adalah pengakhiran pemerintahan Khadafy.³⁹ Kelompok anti-Khadafy, pada tanggal 27 Februari 2011, membentuk Dewan Transisi Nasional, sebuah lembaga koalisi anti-kekuatan Khadafy. Dewan ini dibentuk untuk mengkonsolidasi usaha perlawanan di seluruh negeri.

Tidak seperti di Tunisia dan Mesir, para penguasa di kedua negara cepat jatuh, Libya bertahan lama. Pemimpin Libya, Muammar Khadafy menolak untuk turun. Ia bahkan menghadapi para demonstran dengan kekerasan. Korban jiwa berjatuhan. Pada tanggal 17 Februari 2011, di Benghazi sebanyak 50 demonstran tewas dibunuh. Dalam beberapa minggu kemudian, tindakan kejam terus dilakukan pasukan Khadafy. Bahkan mereka menyerang orang-orang yang tidak berdosa, untuk mempertahankan kekuasaan. Hal itulah yang mendorong Dewan Keamanan PBB menerapkan zona larangan terbang di atas Libya dan memberikan kuasa "untuk mengambil semua langkah yang perlu" untuk melindungi penduduk sipil dari serangan pasukan rezim Khadafy.

Itulah yang membedakan Libya dengan Tunisia dan Mesir. Di Libya tangan-tangan luar (NATO) dan Liga Arab ambil bagian dalam penghancuran rezim yang berkuasa; sementara hal semacam itu tidak terjadi di Tunisia dan Mesir. Hal yang hampir serupa terjadi di Yaman (terjadi persaingan antara Arab Saudi dan Iran) serta di Suriah yang menjadi mandala pertarungan kepentingan negara-negara besar. Sementara persoalan utama Libya adalah negeri itu menjadi tidak aman. Ini merupakan kegagalan dari usaha melucuti dan mendemobilisasi milisi-milisi pemberontak setelah perang. Akibatnya muncul berbagai kelompok bersenjata, yang tidak dapat ditangani pemerintah terpilih. Kondisi seperti itu membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap proses politik demokratik makin menurun, menipis karena dipenuhi rasa frustrasi. Dalam kondisi tiadanya negara (pemerintahan nasional), aktor-aktor regional dan suku-suku memperkuat diri dan memperebutkan kekuasaan.⁴⁰

³⁸ Crisis Group, *Yemen at War*, Sanaa/Brussels, 27 March 2015.

³⁹ Zenko; "Popular Protest In Nort Africa and the Middle East: Makin Sense of Libya." *International Crisis Group*, Middle East/North Africa Report, No 107, 6 June 2011.

⁴⁰ Christopher S.Chivvis, Jeffrey Martini, *Libya After Qaddafi, Lessons and Implication for the Future*, (RAND National Security Research Division, 2014).

Situasi di Suriah jauh lebih rumit. Karena posisi geostrategik Suriah dan aliansi internasionalnya, hampir semua aktor politik utama di dunia terlibat dalam krisis Suriah. Perang saudara di Suriah secara tepat digambarkan sebagai miniatur perang dunia, di mana rivalitas internasional dan regional bertarung dengan mengeksploitasi perpecahan etnik dan sektarian. Dengan hampir separoh penduduk Suriah (sebelum perang jumlah penduduk negeri itu sekitar 23 juta jiwa) tercerai-berai dan ratusan ribu tewas terbunuh, perang saudara Suriah bisa menjadi bencana manusia paling besar di kawasan sejak perang Irak.

D. Kesimpulan

Revolusi *Arab spring*, paling kurang membuahkan tiga hal. Pertama, mayoritas negara-negara di kawasan itu (Timur Tengah dan Afrika Utara), tidak berubah atau hanya sedikit berubah. Mulai dari Saudi Arabia hingga Yordania, elite penguasa menyesuaikan strategi mereka agar bisa tetap bertahan, berkuasa dan menghadapi para penentang. Kategori kedua hasil dari *Arab Spring* menunjukkan sebuah kontes yang relatif berimbang antara massa rakyat yang menuntut perubahan dan rezim yang berkuasa. Tetapi, hal itu menyebabkan pecahnya perang saudara. Libya dan Suriah dapat dimasukkan ke dalam kategori ini, demikian pula Yaman. Akhirnya, ketiga, ada negara-negara yang dapat dikatakan mengalami transisi yang relatif mulus setelah pergantian rezim. Misalnya, Tunisia dan Mesir (meskipun transisi di Mesir tidak begitu aman bila dibandingkan dengan transisi di Tunisia; Mesir lebih banyak mengalami kekerasan dibandingkan Tunisia)

Transisi di Mesir berakhir dalam kudeta militer. Di Mesir, militer kembali berkuasa. Ini berarti kembali ke masa sebelum revolusi. Libya, Yaman, dan Suriah mengalami kolaps politik hampir-lengkap, polirisasi, dan perang saudara. Suriah menjadi sumber krisis baru di Timur Tengah, pasca- *Arab Spring*. Hampir setiap rezim menjadi lebih tidak toleran dan lebih represif. Kondisi Suriah paling rumit, kompleks, dan berat, selain karena perang saudara dan menjadi ajang pertarungan kuasa besar, tetapi juga menjadi tempat beroperasinya kelompok garis keras dan brutal yang menyebut dirinya Negara Islam di Irak dan Suriah/Levant (ISIS/ISIL) melanda di atmosphere yang kaotik ini. Masa depan Libya, Yaman, dan Suriah masih berat; banyak masalah yang masih harus diselesaikan. Persangan antara Arab Saudi dan Iran yang berebut pengaruh, *sphere of influence*, membuat semua pihak yang berkonflik, baik di Suriah maupun di Yaman, enggan untuk memilih jalan kompromi.

Ketimpangan dan korupsi, misalnya, merupakan kunci penting di balik Revolusi 2011 di Tunisia, dan kedua hal tersebut tetap akan menjadi tantangan bagi Tunisia di masa-masa mendatang. Struktur ekonomi, kultur prebendalisme (adalah sistem politik di mana para pejabat terpilih, dan pegawai pemerintah merasa mereka memiliki hak untuk mendapat bagian dari penghasilan pemerintah, dan menggunakannya untuk kepentingan para pendukungnya, dan anggota kelompok etniknya. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pola korupsi di Nigeria) dan sistem korupsi telah meningkatkan

pemusatan kekayaan di tangan sedikit orang dan ketimpangan umum terjadi. Ancaman nyata terhadap demokrasi Tunisia adalah bahwa ketimpangan ekonomi telah menjadi penyebab terjadi kerusuhan di beberapa wilayah.

Yang dicapai Tunisia saat ini, bagaimana pun, adalah sebuah capaian besar yang belum bisa dicapai oleh negara-negara lainnya sama-sama disapu Revolusi Musim Semi. Karena itu, capaian tersebut bisa dikatakan sebagai “*milestones*”, sebuah *success story* dari Arab Spring. Tetapi, ketegangan politik, masalah-masalah ekonomi, ancaman teroris, dan dinamika regional tampaknya tetap merupakan tantangan bagi Tunisia. Meskipun Tunisia, relatif tidak banyak mengalami konflik, Tunisia tetap merupakan tempat yang potensial bagi pertarungan regional antara ideologi-ideologi politik yang bersaing, dan antara kelompok-kelompok ekstremis garis keras (apalagi wilayah selatan, sebelah timur berbatasan dengan Libya yang masih dilanda kemelut, dan sebelah barat berbatasan dengan Aljazair, yang di juga memiliki kelompok garis keras). Karena itu, perbaikan ekonomi, peningkatan peran serta rakyat, reformasi politik-ekonomi, dan mempercepat kebebasan sipil menjadi sarana untuk melawan gerakan terorisme dan bentuk-bentuk aksi kekerasan sektarian dan ekstremisme.

Tetapi, *Arab Spring* atau *Arab Awakening* tetap hanya bagian dari cerita atau apa yang akan menentukan masa depan Timur Tengah. Beberapa kecenderungan lain—perubahan peta energi, usaha mengekang perkembang-biakan senjata pemusnah massal, krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, dan persaingan di antara pemain global dan regional—juga harus menjadi faktor dalam memprediksikan apa yang akan terjadi di kawasan itu pada tahun-tahun mendatang.

Timur Tengah tidak hanya ditentukan oleh tren-tren global, tetapi justru akan menentukan apakah bagian dunia lain akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Setiap skenario potensial Timur Tengah memiliki implikasi besar bagi dunia. Misalnya, pecah konflik regional besar yang tidak dapat dicegah, maka akan berdampak buruk pula terhadap perekonomian global. Demikian juga persaingan antara Arab Saudi dan Iran yang memperebutkan pengaruh, hegemoni, di Timur Tengah, misalnya di Suriah dan Yaman, akan juga mempengaruhi perdamaian dan kemakmuran kawasan. Dan, sekarang semakin merebak kelompok radikal dan teroris yang malang melintang, misalnya di Suriah dan Irak, juga akan mengancam negara-negara lain. Sebaliknya, Timur Tengah yang menempati posisi strategis yakni di jalan simpang antara Eropa, Asia, dan Afrika, akan memberikan besar juga dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi. Pendek kata, dunia yang lebih makmur dan damai adalah tidak mungkin tanpa adanya Timur Tengah yang stabil dan aman.

- Disampaikan dalam Seminar “Peranan Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Timur Tengah”, 14 April 2016, di UIN Sunankalijaga, Yogyakarta.

Bahan-bahan Pendukung:

1. A, Stephen, & Linz, JJ (2013) Democratization theory and the “Arab Spring”, *Journal of Democracy*, 24(2).
2. Abul-Magd, Zeinab *The Egyptian military in politics and economy: Recent history and current transition status*, (Chr. Michelson Institute), Oktober 2013. No.2
3. Abusharif, Ibrahim N, *Parsing “Arab Spring”*, (Northwestern University in Qatar), February 2014.
4. AfDB, *The Revolution in Tunisia: Economic Challenges and Prospect*, 11 March 2011.
5. Al Aswany, Alaa, *On The State of Egypt, What Made The Revolution Inevitable*, (Vintage Book, New York, USA), 2011.
6. Alexis Arieff and Carla E Humud, *Political Transition in Tunisia*, Congressional Research Service, USA, February 10, 2015.
7. Anderson, Lisa, “Demystifying the Arab Spring”, *Foreign Affairs*, 90, May/June 2011.
8. Bowen, Jeremy, *The People Want The Fall of The Regime. The Arab Uprisings*, 2012, (Simon&Schuster, London).
9. Bradley, John, *After the Arab Spring: How Islamist Hijacked The Middle East Revolts*, (Palgrave/MacMillan, New York), 2012.
10. Chivvis, Christopher S dan Martini, Jeffrey, *Libya After Qaddafi, Lessons and Implications for the Future*, (RAND National Security Research Division), Santa Monica, Ca, 2014.
11. Cinar, Sertan & Ismet Gocer, “The Reasons and Economic and Political Consequences of Aran Spring”, *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol 17, No.2, 2014.
12. Danahar, Paul, *The New Middle East, The World After The Arab Spring*, (Bloomsbury, London) 2013.
13. Desai, RM, Anders, Olofsgard.& Yousef, T. (2011) *Is the Arab Authoritarian Bargain Collapsing?*, (Brooking Institute), 9 February 2011.
14. Elhousseini, Fadi, “Post Arab Spring Thoughts: The Middle East between External and Internal Mechanisms”, *Hemisphere*, Vol.29, No.2, 2014.
15. F Lang Jr, Anthony, “From revolutions to constitutions: the case of Egypt”, *International Affairs* 89:2 (2013).
16. G Bermeo, Nancy, “Poverty, Inequality, and Democracy: Does Electoral Democracy Boost Economic Equality?” *Journal of Democracy*, 20.4 (2009).
17. Kuncahyono, Trias, *Tahrir Square, Jantung Revolusi Mesir*, (Penerbit Buku Kompas, Jakarta), 2013.
18. L Gelvin, James, *The Arab Springs, What Everyone Needs to Know*, (Oxford University Press), 2012.
19. Lin, Noueihed dan Warren, Alex, *The battle for the Arab Spring: revolution, counterrevolution and the making of a new era*. (New Haven: Yale University Press), 2013.1-348. Print, dalam Dor Srebernik, *Inequality and Corruption: Drivers of Tunisia’s Revolution*, 2014, Vol.6 No.10/pg.1/2
20. Manfreda, Primoz, *Definition of the Arab Spring*, November 25, 2014

21. Michael C Hudson (conv), *The Crisis of the Arab State*, , Harvard Kennedy School, August 2015.
22. Mulderig, M Chloe, *An Uncertain Future: Youth Frustration and the Arab Spring*, (Boston University), The Pardee Papers/No.16/April 2013.
23. Nadia Oweidat, Cheryl Benard, Dale Stahl, Walid Kildani, Edward O'Connell, dan Audra K. Grant, *The Kefaya Movement, A Case Study of a Grassroots Reform Initiative*, (Rand National Defense Research Institute, Santa Monica, California), 2008.
24. Rogan, Eugene , "Regional Overview", Chapter One, dalam *The Arab Spring, Implications for British Policy*, Conservative Middle East Council, October 2011, Oxford.
25. Siala, Mohamed dan Nehed Ben Ammar, *Tunisia's Revolution And Youth Unemployment*, Eurasian Journal of Economic and Fincance, 1(2),2013.
26. Shehadeh, Raja dan Penny Johnson (ed), *The Unravelling of the Old Order in the Middle East, Shifting Sands*, (Profile Books LTD, London), 2015.
27. Srebenik, Dor, "Inequality and Corruption: Drivers of Tunisia's Revolution", dalam *Studen Pulse*, 2014, Vol.6 No.10.
28. St John, ¹ Ronald Bruce, *A Transatlantic Perspective on The Future of Libya*, The German Mashall Fund of the United Stated, 2012.
29. Stepan, Afred "Tunisia's Transition And The Tolerations", dalam *Journal of Democracy*, April 2012, Volume 23, Number 2.
30. . Stepan, Afred dan Juan J Linz, "Democratization Theory And The 'Arab Spring'", dalam *Journal of Democracy*, April 2013, Volume 24. Number 2 .
31. Telhami, Shibley, "Egypt, Tunisia, and Iran", *Digest of Middle East Studies*, 20, Spring 2011.
32. Zenko; "Popular Protest In Nort Africa and the Middle East: Makin Sense of Libya." *International Crisis Group*, Middle East/North Africa Report, No 107, 6 June 2011.

CURRICULUM VITAE

Name : Trias Kuncahyono, Michael

Place, date of birth : Yogyakarta, 11 June 1958

Marital status : Married with one son
Atie Nitiasmoro, wife and Abishai Sahadeva, son

Nationality : Indonesian

Office Address : Editorial Department
26-28, Jl. Palmerah Selatan – Jakarta 10270

Office Phone/Fax : Phone (62-21) 5347710/20/30
Fax (62-21) 5347739

Occupation : Deputy Chief Editor of *Kompas Daily*, since July, 2007

Occupation records : * 1983 – 1987 Journalist of *Suara Karya Daily*
* 1987 – 1990 Journalist of *Kompas Daily*
* 1991 – 1993 Managing Editor, *Bernas Daily Yogyakarta*
* 1994 – 1995 Editor for Law News – *Kompas Daily*
* 1995 – 1996 Editor for Politic News – *Kompas Daily*
* 1996 – 1999 Editor for International Affairs – *Kompas Daily*
* 1999 – 2000 Deputy Chief Editor – *Warta Kota Daily*
* 2000 – 2007 Managing Editor – *Kompas Daily*
* 2007 – Now Deputy Chief Editor – *Kompas Daily*



EXPERIENCES :

1. Coverage on People's Power Revolution in Philippine (0986)
2. Coverage on Russia's Parliamentary Election, (1993)
3. Coverage on Russia's Election, (1996)
4. Coverage on Summit Meeting Bill Clinton - Boris Yeltsin In Helsinki, Finland, (1997)
5. Coverage on Philippine's Election, (1986; 1992; 1998)
6. Journalistic visit to Russia, Estonia, Bulgaria, Italy, South Africa, Chile, Argentina
7. Journalistic visit to Iraq, (2000; 2003)
8. Journalistic visit to Jordan, (2003)
9. Journalistic visit to Israel and Egypt, (2005)
10. Journalistic visit to Pakistan, (2006)
11. Coverage on Gaza War and Journalistic visit to Egypt, (2008-2009)
12. Journalistic visit and attending Senior Editor's Meeting in Australia (2010)

13. Journalistic visit and attending India-ASEAN Business Conclave in India (2011)
14. Journalistic visit and attending Interfaith Dialogue Indonesia-Serbia and Indonesia-Greece in Beograd and Athena (2011)
15. As a speaker on Interfaith Dialogue Indonesia – Russia in Moscow and Kazan (2011)
16. As a speaker on One Day Discussion: ASEAN Vision Pasca 2015 - at Malang, West Java (2011).
17. As a speaker on One Day Seminar: Challenge of ASEAN Leadership –at UGM Yogyakarta (2011)
18. As a speaker on One Day Seminar: Public Diplomacy – at Unisba Bandung (2011)
19. Attending Indonesia-China Bilateral Forum – Beijing China (Sept 2012)
20. Coverage on Gaza War and journalistic visit to Egypt and Lebanon on November 2012
21. Panel Discussion of Peace Process on Middle East – June 2013
22. As a speaker on Focus Group Discussion LIPI – “Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional” – (September 2013)
23. As a speaker on Two Days Seminars on 18-19 March 2014 by Keuskupan Agung Semarang –theme “Bagaimana Situasi Politik di Indonesia tahun 2014” at Muntilan
24. As a Speaker on Focus Group Discussion “Peran Media sebagai Aktor Non Negara di Fora Multilateral– at Bogor on 2 May, 2014. Held by Kementerian Luar Negeri RI.
25. As a Speaker of Seminar “The Role of Civil Society in Democratic Transition: Indonesia’s Experience” at Sousse University, Tunisia (December 2014).
26. Pembicara dalam seminar, “Middle East Update: ISIS, Konflik Palestina-Israel, dan Politik Luar Negeri Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2 Oktober 2014 di Bandung.
- 27.
28. Journalistic Visit and attending a Media Forum at Iran (March 2015) hosted by Islamic Islamic Culture and Relation Organization.
29. Attending China – Indonesia Bilateral Forum 2015 – Beijing China on June 2015.
30. Discussion on International Conference on the Question of Jerusalem, held by UN in Jakarta, December 14, 2015.
31. As a Speaker on Seminar Middle East After Arab Spring, held by Kementerian Luar Negeri RI, 15 Desember 2015
32. Pembicara dalam Seminar “ISIS dan Kombatan Asing di Suriah: Dampak bagi Acaman di Indonesia”, di Kementerian Luar Negeri RI, 21 April 2015.
- 33.

EDUCATION :

1978-1983 Department International Relations
Faculty Social and Political Sciences
The Gadjah Mada University, Yogyakarta

PUBLICITY/BOOKS :

1. Dari Damaskus ke Baghdad
2. Bulan Sabit di Atas Baghdad
3. Iraq Korban Kaum Hawkis
4. Musafir dari Polandia
5. Jerusalem
6. Jalur GAZA
7. Jerusalem 33
8. Musim Semi di Suriah
9. Tahrir Square, Jantung Revolusi Mesir

